



Siswa-siswi sekolah dasar di Kabupaten Lombok Tengah belajar mengenal kata dan kalimat melalui permainan edukatif untuk memahami literasi dasar. (©Tim Komunikasi INOVASI)

Risalah Kebijakan

Mengoptimalkan Kualitas Lingkungan Belajar dan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lombok Tengah

Mendorong Transformasi Sekolah Inklusif dan Tanggap Iklim di Kabupaten Lombok Tengah: Strategi Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Aman dan Setara



Capaian & situasi pembelajaran

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan murid di Kabupaten Lombok Tengah belum menguasai kemampuan dasar dengan baik. Hal ini turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar yang belum sepenuhnya aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan kebutuhan murid.



Faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar

Tiga faktor utama yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid di Kabupaten Lombok Tengah meliputi masih adanya perundungan dan kekerasan (termasuk kekerasan berbasis gender) di sekolah, budaya patriarki dan perkawinan anak yang lebih banyak merugikan murid perempuan, serta praktik pendidikan yang belum maksimal mengakomodasi kebutuhan murid disabilitas. Selain itu, langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sistematis masih terbatas.



Rekomendasi kebijakan

Penting bagi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk segera mengambil langkah nyata. Dari pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan: (1) menerapkan program pencegahan dan penanganan kekerasan yang inklusif di sekolah dan masyarakat, (2) mendorong pemenuhan akomodasi yang layak bagi murid disabilitas, (3) memperluas akses bantuan sosial bagi murid dari keluarga miskin, (4) menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan, serta (5) melaksanakan hasil dan rekomendasi Musrenbang.

Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan, dari angka 0-100, skor literasi dan numerasi murid di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sebesar 51,29 dan 41,1 (Kemendikbud, 2024). Kedua skor itu lebih rendah sekitar satu poin dari nilai rata-rata provinsi.

Hasil Asesmen Nasional juga menunjukkan kesenjangan antara skor literasi dan numerasi murid laki-laki dan perempuan (Kemendikbud, 2022) sebagai berikut:

Literasi : Laki-laki 43,41; perempuan 48,05

Numerasi : Laki-laki 33,94; perempuan 35,67

Masing-masing skor tersebut lebih rendah sekitar 1-2 poin dari nilai rata-rata provinsi. Selain itu, murid perempuan secara konsisten memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan murid laki-laki.

Berdasarkan temuan riset, pelaksanaan, dan evaluasi program INOVASI, rendahnya hasil belajar dan perbedaan capaian murid turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar. Sekolah dapat menjadi tempat dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung jika memupuk dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta aksi perubahan iklim. Di Kabupaten Lombok Tengah, kesadaran, pengetahuan, dan praktik terkait isu-isu tersebut masih perlu diperkuat.

Temuan Utama

INOVASI telah melakukan pemetaan situasi kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta perubahan iklim dengan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Lombok Tengah pada Desember 2024. Dari pemetaan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid meliputi:



Kesetaraan gender

Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan sebanyak 2-4 dari 10 murid merasa tidak aman dari perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual di sekolah (Kemendikbud, 2024). Hal ini disebabkan pemangku kepentingan belum paham sepenuhnya tentang definisi kekerasan dan tindakan disiplin, cakupan pemberian hukuman, serta siapa yang paling berisiko mengalami kekerasan. Sekolah pun enggan melaporkan kasus kekerasan karena risiko rusaknya nama baik dan reputasi.

Selain itu, budaya patriarki yang sudah mengakar melanggengkan praktik perkawinan anak. Praktik ini dapat merugikan murid perempuan karena mereka seringkali tidak diprioritaskan keluarga untuk menempuh pendidikan tinggi dan berisiko putus sekolah di usia dini. Praktik ini juga menghambat karier dan capaian masa depan mereka, salah satunya mengurangi potensi mereka untuk menempati posisi kepemimpinan.



Inklusi disabilitas dan sosial

Dari 1.698 murid penyandang disabilitas (usia 5-18 tahun), sekitar 19% tidak sekolah dan 81% bersekolah. Mereka belajar di sekolah non-inklusif (22%), sekolah inklusi (27%), atau sekolah luar biasa/SLB (32%) (BPS & Kemendikbud, 2023). Namun, bagi mayoritas murid di kelompok ini, akses ke dan di sekolah masih jauh dari kondisi memadai. Guru dan tenaga pendukung (terapis dan psikolog) dengan kualifikasi khusus, untuk mendukung kebutuhan spesifik mereka, belum banyak tersedia.

Stigma sosial tentang disabilitas pun semakin meluas di masyarakat. Akibatnya, orang tua sering tidak memeriksakan kondisi anak ke dokter, menyembunyikan kondisi anak, bahkan tidak menyekolahkan anak karena merasa tidak perlu atau takut anak tersebut mengalami perundungan.

Di sisi lain, masih banyak pula murid yang termarginalkan. Contohnya, murid yang berasal dari keluarga miskin, murid yang hanya bisa berbahasa Sasak, murid yang terlibat dalam perkawinan anak, dan murid dengan orang tua merantau (pekerja migran) atau berpisah.



Perubahan iklim

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)¹ Kabupaten Lombok Tengah mencapai 127,55 dari 250. Angka tersebut lebih tinggi dari indeks Nusa Tenggara Barat (115,31), tetapi di bawah indeks Indonesia (132,25) (BNPB, 2023). Menurut IRBI, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrem, serta tsunami berisiko tinggi di kabupaten ini.

Sebagian masyarakat sudah melaksanakan langkah mitigasi dan adaptasi secara mandiri. Misalnya, melakukan reforestasi, mengurangi penggunaan plastik, dan memanfaatkan kearifan lokal untuk deteksi bencana. Namun, langkah yang lebih sistematis masih terbatas. Kabupaten ini belum memiliki sistem peringatan dini, rencana dan skema evakuasi, serta regulasi tentang respons terhadap bencana. Pendidikan perubahan iklim di sekolah pun belum terintegrasi dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Akibatnya, masyarakat belum mampu mengurangi dampak bencana secara signifikan dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.

¹ Penghitungan IRBI terdiri atas komponen bahaya (*hazard*, terkait fenomena alam), kerentanan (*vulnerability*, terkait kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan), serta kapasitas (*capacity*, terkait unsur ketahanan kelembagaan daerah).

Ketiga faktor tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, sosial-budaya, dan geografis (interseksionalitas) berikut ini:



Kemiskinan dan gender

Kemiskinan merupakan penyebab utama murid putus sekolah. Murid laki-laki harus bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara, murid perempuan seringkali menjadi korban perkawinan anak, solusi cepat dalam mengurangi beban ekonomi keluarga.



Disabilitas dan gender

Hambatan yang dialami anak penyandang disabilitas juga dipengaruhi oleh faktor gender. Misalnya, anak perempuan penyandang disabilitas memiliki hambatan lebih besar untuk mengakses informasi mengenai menstruasi dan kesehatan reproduksi.



Gangguan belajar akibat perubahan iklim

Dampak perubahan iklim memengaruhi angka kehadiran murid yang tinggal dan sekolah di daerah rawan bencana. Hal ini juga mempersulit akses kesehatan dan informasi bagi anak penyandang disabilitas.

Rekomendasi Kebijakan

Melihat temuan tersebut, penting bagi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk segera mengambil langkah nyata. Berdasarkan pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah. Kebijakan ini akan berkontribusi langsung pada peningkatan capaian belajar dan kesejahteraan murid.



Dinas Pendidikan: Menerapkan program pencegahan dan penanganan kekerasan yang inklusif di sekolah dan masyarakat

1. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat maupun melalui media digital. Sosialisasi ini perlu mengutamakan pencegahan perkawinan anak, khususnya pada kelompok anak perempuan.
2. Memastikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat kabupaten dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah berjalan optimal, sesuai SK Bupati Lombok Tengah Nomor 109 Tahun 2024. Satgas akan bekerja sama dengan TPPK untuk mengadvokasi program pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, seperti pendidikan karakter dalam kurikulum, penyediaan fasilitas yang aman (seperti toilet terpisah), serta penerapan tindakan disiplin positif yang relevan dengan perilaku murid.



Dinas Pendidikan & Dinas Sosial: Mendorong pemenuhan pelayanan dan akomodasi yang layak bagi murid penyandang disabilitas

1. Mengupayakan pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati tentang akomodasi yang layak (AYL). Aturan ini bisa menjadi standar dalam penyediaan akses dan fasilitas belajar bagi murid penyandang disabilitas.
2. Mengumpulkan data terkait ragam, tingkat kesulitan, dan kebutuhan murid penyandang disabilitas secara berkala dan mengelolanya secara terpusat melalui dashboard Profil Belajar Siswa (PBS), yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, data disabilitas bisa menjadi landasan pembentukan kebijakan, pemberian dukungan, dan penguatan kapasitas guru untuk memenuhi akomodasi murid, khususnya dalam pembelajaran di kelas.
3. Memastikan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan di tingkat kabupaten berjalan secara optimal agar murid penyandang disabilitas bisa selalu mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
4. Melakukan sosialisasi program pendidikan inklusif, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat, melalui kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, maupun melalui media digital. Sosialisasi ini bertujuan mengurangi stigma sosial dan risiko perundungan serta menjamin pemenuhan hak kesehatan dan pendidikan bagi murid penyandang disabilitas.



Dinas Sosial: Memperluas akses program kesejahteraan sosial dan bantuan ekonomi bagi murid dari keluarga miskin

1. Melakukan sosialisasi program dan bantuan secara langsung ke masyarakat, terutama murid dari keluarga miskin dan yang tidak diasuh oleh keluarga inti. Melalui sosialisasi ini, mereka dapat mengetahui dan segera mengakses bantuan pendidikan yang relevan.
2. Bekerja sama dengan sekolah dan organisasi berbasis masyarakat untuk mengoptimalkan jangkauan dan akses murid terhadap program dan bantuan pendidikan.



Dinas Pendidikan & Dinas Lingkungan Hidup: Menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan

1. Mendukung pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati tentang integrasi pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum. Regulasi ini bertujuan mengikat setiap sekolah untuk memasukkan isu perubahan iklim dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
2. Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk merancang skema evakuasi bencana di sekolah. Dengan begitu, murid dan guru memiliki kesiapsiagaan, mampu merespons bencana, dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.



Dinas Pendidikan: Melaksanakan hasil dan rekomendasi dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pendidikan untuk mendukung penerapan rekomendasi kebijakan ini, juga meningkatkan capaian literasi dan numerasi, pendidikan karakter, serta pencegahan perkawinan anak



Seorang guru sedang mendampingi muridnya memahami konteks bencana alam melalui buku pelajaran (©Tim Komunikasi INOVASI)